BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara (Hasan, 2024; Nugroho et al., 2023). Bank tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan *(financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Putera, 2020; Vrotslavskyy & Dropa, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank memiliki fungsi utama, yaitu fungsi *intermediasi*, yang memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk memperoleh modal usaha, melakukan transaksi keuangan, serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Selain fungsi tersebut, bank juga memiliki fungsi sosial yang dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas ekonomi (Biondi, 2018; Huq & Tribe, 2018).

Secara umum, bank terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bank konvensional dan bank Syariah (Septi Dwi Wulandari et al., 2024). Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta mengutamakan konsep

keadilan dan kemitraan. Bank syariah memainkan peran strategis dalam mendukung masyarakat melalui berbagai produk dan layanan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk pembiayaan mikro untuk keluarga prasejahtera (Fajri, 2024).

Salah satu bank yang memiliki fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah BTPN Syariah (Tama Putra Saratian et al., 2024). Sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang secara khusus melayani segmen prasejahtera produktif, BTPN Syariah berkomitmen untuk memberdayakan keluarga prasejahtera melalui berbagai program unggulan (Angraeny et al., 2023). Bank ini tidak hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga menyediakan program pendampingan, pembiayaan, literasi keuangan, dan manajemen keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Program pendampingan dan pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah didesain untuk memberdayakan nasabah, terutama perempuan kepala keluarga prasejahtera produktif (Mitayani & Samsudin, 2024). Dengan pendekatan yang personal dan berbasis komunitas, BTPN Syariah berupaya meningkatkan kapasitas nasabah dalam mengelola usaha kecil mereka. Pendampingan ini dilengkapi dengan *edukasi literasi* keuangan untuk membantu nasabah memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, termasuk alokasi dana untuk kebutuhan produktif dan konsumtif (Boangmanalu & Sudiarti, 2024).

Komitmen BTPN Syariah dalam memberdayakan keluarga prasejahtera produktif juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya pada poin pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan inklusi keuangan. Melalui pendekatan ini, BTPN Syariah tidak hanya membantu nasabah meningkatkan penghasilan,

tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga prasejahtera secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami individu atau kelompok sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Secara ekonomi, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, serta kondisi geografis. Standar kebutuhan minimal ini bervariasi antar wilayah, tergantung pada kebiasaan masyarakat, fasilitas transportasi, distribusi, dan letak geografis. Dalam konteks Indonesia, pengukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach),* yang mendefinisikan penduduk miskin sebagai individu dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023 dan 0,54 persen poin dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang, berkurang 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 dan 1,14 juta dibandingkan September 2022. Penurunan ini terjadi baik di perkotaan (dari 7,29 persen menjadi 7,09 persen) maupun di perdesaan (dari 12,22 persen menjadi 11,79 persen), mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Namun, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan pemerataan kesejahteraan.

Jumlah penduduk miskin di Sumatra Utara mencapai 1.228,01 ribu orang, sedikit menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1.239,71 ribu orang.

Persentase penduduk miskin secara keseluruhan juga mengalami penurunan dari 8,15 persen pada Maret 2023 menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 709,98 ribu menjadi 697,46 ribu dengan penurunan persentase dari 8,23 persen menjadi 7,93 persen. Sebaliknya, di perdesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 529,73 ribu menjadi 530,55 ribu, meskipun persentase kemiskinan sedikit naik dari 8,03 persen menjadi 8,08 persen. Data ini menunjukkan tren penurunan kemiskinan secara keseluruhan, meski terdapat tantangan khusus di wilayah perdesaan.

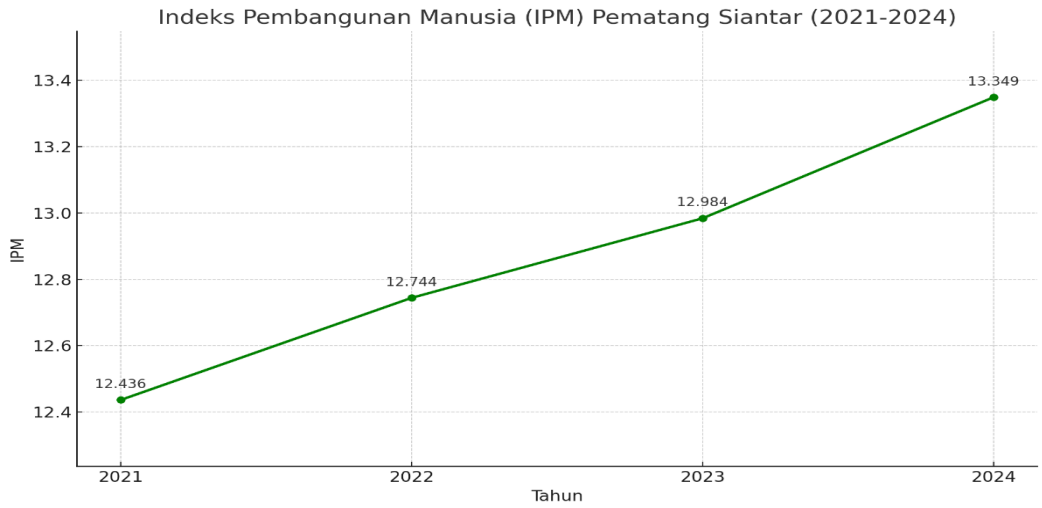

Sumber : Indeks Pembangunan Pematang Siantar (IPM) tahun 2021-2024

Gambar 1.1. Jumlah pengeluaran perkapita di pematang Siantar

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan. Salah satu inisiatif penting adalah program pendampingan dan pembiayaan berbasis syariah yang dilakukan oleh BTPN Syariah melalui program Daya. Program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif, khususnya perempuan, melalui pembiayaan mikro dan pendampingan kewirausahaan. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti: (1) Rendahnya literasi keuangan masyarakat

prasejahtera. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman dasar mengenai manajemen keuangan, sehingga mereka sulit mengelola pendapatan dan pengeluaran secara optimal. Akibatnya, pembiayaan yang diberikan kurang dimanfaatkan secara produktif, dan risiko kredit macet tetap tinggi. (2)Terbatasnya modal usaha dan akses pembiayaan yang inklusif Sebagian besar masyarakat prasejahtera di Pematang Siantar tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang memadai untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal. Meski BTPN Syariah telah menawarkan pembiayaan tanpa jaminan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa akses ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. (3) Pendekatan pemberdayaan yang kurang berbasis kebutuhan lokal. Beberapa program pemberdayaan dinilai terlalu *top-down,* sehingga kurang efektif dalam menjawab kebutuhan spesifik komunitas lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelibatan komunitas dalam desain program dapat meningkatkan keberhasilan intervensi social ekonomi. (4) Keterbatasan jangkauan program pemberdayaan ke wilayah terpencil. Sebagian wilayah di Pematang Siantar yang lebih terpencil masih menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap layanan keuangan dan pendampingan kewirausahaan. Hal ini disebabkan oleh kendala infrastruktur, kurangnya tenaga pendamping, serta biaya operasional yang tinggi untuk menjangkau daerah tersebut. (5) Minimnya keberlanjutan usaha bagi penerima manfaat. Meskipun banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan, tantangan tetap ada dalam memastikan keberlanjutan usaha mereka. Beberapa nasabah menghadapi hambatan seperti ketidakstabilan pendapatan, persaingan pasar, dan keterbatasan akses terhadap teknologi serta informasi.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategi yang digunakan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah seperti BTPN Syariah memainkan peran signifikan dalam memperluas keuangan inklusif melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pendampingan, pembiayaan mikro, dan manajemen keuangan. Program ini dirancang untuk mendukung keluarga prasejahtera produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kota Pematang Siantar, yang memiliki populasi keluarga prasejahtera yang signifikan, menjadi wilayah yang potensial untuk program pengembangan ini. Namun, meskipun berbagai program telah diimplementasikan, tantangan struktural seperti rendahnya akses terhadap pendidikan keuangan, terbatasnya modal usaha, serta minimnya pengetahuan tentang manajemen keuangan rumah tangga masih menjadi hambatan utama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan ini sering kali diperparah oleh pendekatan pemberdayaan *top-down* yang kurang mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga program tidak efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang.

BTPN Syariah, melalui program Daya, berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera produktif secara berkelanjutan dan terukur. Program ini dirancang untuk membangun kapasitas nasabah melalui berbagai kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendampingan ini mencakup akses pengetahuan, pelatihan, dan dukungan kewirausahaan yang dirancang khusus untuk kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok. Misalnya, pendampingan individu seperti program Nasabah Inspiratif dan Bestee memberikan pelatihan kewirausahaan yang terfokus dan

terintegrasi dengan platform digital, melibatkan mahasiswa, praktisi, serta lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Pendampingan kelompok merupakan bagian dari pemberdayaan yang dilakukan secara reguler di komunitas atau sentra nasabah. Kegiatan ini memberikan informasi dan pelatihan tentang kewirausahaan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga peluang usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini. Selain itu, nasabah yang menunjukkan pertumbuhan usaha yang signifikan mendapatkan pelatihan intensif berupa webinar oleh mitra berpengalaman. Pendekatan ini tidak hanya membantu nasabah meningkatkan usahanya tetapi juga memberdayakan komunitas lokal melalui dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah yang sudah didampingi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah pendampingan
2020	**43**
2021	**55**
2022	**62**
2023	**41**
2024	**58**

Sumber: mms siantar timur 2024

Sourc :https://btpnsyariah.com/documents/20182/90707/BTPS+Pubex+26+Oct+2023

Gambar 1.2. Program Bestee BTPN Syariah

Program pembiayaan BTPN Syariah juga mendukung masyarakat prasejahtera produktif melalui sistem pembiayaan syariah berbasis akad Wakalah wal Murabahah , di mana pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang atau kebutuhan produktif, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal, sesuai prinsip syariah tanpa unsur riba. Skema ini memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah besar cicilan tetap selama periode pembiayaan.

Program ini secara khusus menyasar perempuan prasejahtera produktif dan menitikberatkan pada pembentukan karakter melalui konsep BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu). Dengan pendekatan holistik ini, BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan, edukasi keuangan, serta penguatan kapasitas diri bagi para nasabah, sehingga mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih mandiri secara finansial, meningkatkan daya saing usaha, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga mereka secara berkelanjutan.

BTPN Syariah telah terlibat aktif dalam menyediakan solusi pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera produktif, dengan fokus utama membantu perempuan mengakses sumber daya keuangan untuk mendukung usaha kewirausahaan mereka. Dengan menawarkan produk pembiayaan yang disesuaikan, seperti kredit mikro dan pinjaman modal kerja, BTPN Syariah memastikan bahwa individu-individu ini dapat mengakses dana yang diperlukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Layanan keuangan ini meliputi pinjaman mikro yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan wirausaha perempuan di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, sehingga mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha kecil mereka. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan bank untuk mempromosikan inklusi keuangan, dengan menawarkan jalur yang layak bagi kelompok-kelompok marjinal untuk meningkatkan status ekonomi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih luas.

Tabel 1.2

Jumlah pembiayaan yang diberikan Bank BTPN Syariah 2024

Jumlah pembiaayan
Rp 3000.000 – Rp 5000.000 rentang waktu lama pembayaran 12 bulan
Rp 5000.000 – Rp 7000.000 rentang waktu lama pembayaran 18 bulan
Rp 10.000.000—Rp 30.000.000 rentang waktu lama pembayara 12 -18 bulan

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BTPN Syariah adalah Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. Produk ini menggabungkan fasilitas pembiayaan, tabungan, serta manfaat asuransi berbasis prinsip syariah. Program ini dirancang khusus untuk mendukung keluarga prasejahtera dan cukup sejahtera secara berkelanjutan. Selain menawarkan produk keuangan, program ini juga mengutamakan pemberdayaan karakter nasabah melalui budaya Berani Berusaha,

Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS), guna membentuk perilaku yang mendukung keberhasilan usaha serta kehidupan sosial mereka.

Produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok memiliki berbagai fitur utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam hal akad pembiayaan, digunakan prinsip syariah Murabahah serta Wakalah wal Murabahah. Tabungan yang disertakan dalam paket produk ini menggunakan akad Wadiah, memberikan rasa aman bagi nasabah. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif. Nasabah yang dapat mengakses produk ini meliputi perorangan atau anggota komunitas/paguyuban, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, dengan usia minimum 18 tahun (bagi yang sudah menikah) atau 21 tahun (bagi yang belum menikah), dan maksimum 60 tahun, kecuali nasabah yang masih melanjutkan siklus pembiayaan.

Plafon pembiayaan yang ditawarkan dalam program ini berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 100 juta, tergantung pada jenis fasilitas yang diambil oleh nasabah. Jangka waktu pembiayaan juga fleksibel, mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun. Menariknya, program ini tidak memerlukan jaminan, sehingga memudahkan akses bagi nasabah prasejahtera. Pembayaran angsuran dilakukan melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS), yang menjadi bagian dari pendekatan komunitas dalam program ini. Dengan fitur-fitur tersebut, Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga mendukung pembangunan komunitas berbasis syariah

Namun, tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran ini cukup signifikan. Banyak dari mereka yang masih dalam tahap awal perjalanan kewirausahaan dan tidak memiliki agunan yang cukup atau riwayat kredit yang kuat

untuk mengakses layanan perbankan tradisional. Akibatnya, mereka sering menghadapi kendala dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Sebagai tanggapan, BTPN Syariah telah mengembangkan produk dengan persyaratan agunan rendah, serta program pelatihan dan pemberdayaan, untuk keterampilan kewirausahaan para kliennya. Pendekatan holistik ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan modal tetapi juga untuk membekali penerima manfaat dengan perangkat yang mereka butuhkan untuk mengelola bisnis mereka secara efektif, memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Lebih jauh, meskipun model pembiayaan BTPN Syariah telah terbukti efektif, tantangan tetap ada dalam hal jangkauan dan skalabilitas. Menjangkau daerah terpencil dan memastikan bahwa manfaat inklusi keuangan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat prasejahtera produktif tetap menjadi prioritas. Komitmen bank untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui produk-produk yang sesuai dengan Syariah memberikan landasan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini, tetapi upaya berkelanjutan dalam memperluas akses dan menawarkan dukungan yang dipersonalisasi akan diperlukan untuk memaksimalkan dampaknya. Pendekatan ini sangat penting untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif di Indonesia

Menghadapi tantangan ini, pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kebutuhan lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Penelitian Beck dkk. (2020) dan Klapper dkk. (2019) menekankan pentingnya pendidikan keuangan untuk meningkatkan kapasitas keluarga prasejahtera dalam mengelola keuangan. Selain itu, Banerjee dkk. (2021)

menunjukkan bahwa pelibatan komunitas dalam program desain dapat meningkatkan keberhasilan intervensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang mengintegrasikan unsur pendampingan, pembiayaan, dan manajemen keuangan menjadi solusi potensial untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, khususnya di wilayah seperti Pematang Siantar.

Selain itu, manajemen keuangan yang baik mendorong keberlanjutan usaha kecil dan mikro. Melalui pelatihan dan pendampingan, seperti yang dilakukan BTPN Syariah dalam program Daya, masyarakat dapat memahami cara menyusun laporan keuangan sederhana, menilai profitabilitas usaha, dan merencanakan pengembangan usaha jangka panjang. Dengan demikian, manajemen keuangan menjadi keterampilan esensial yang tidak hanya meningkatkan keberhasilan usaha tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sumber : Indeks Pembangunan Pematang Siantar (IPM) tahun 2021-2024

Gambar 1.3. Jumlah IPM di pematamg siantar

Dalam literatur yang ada, berbagai kajian telah menggaris bawahi pentingnya integrasi pendekatan pendampingan, pembiayaan mikro, literasi keuangan, dan manajemen keuangan dalam program pemberdayaan (Agarwal et al.,

2022; World Bank, 2021). Pendampingan, misalnya, dianggap sebagai elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi aktif keluarga prasejahtera dalam program pemberdayaan (Dupas & Robinson, 2019). Sementara itu, pembiayaan mikro terbukti efektif dalam menyediakan akses modal bagi usaha kecil, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga prasejahtera produktif (Morduch, 2020). Di sisi lain, literasi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan risiko keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik, sedangkan manajemen keuangan yang baik memungkinkan keluarga untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien (Lusardi & Mitchell, 2019).

Dari berbagai tantangan ini, menjadi jelas bahwa pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di Pematang Siantar. Program pemberdayaan perlu dirancang tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas komunitas secara keseluruhan. Selain itu, pengintegrasian pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan teknologi dapat menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pemberdayaan di masa depan.

Namun, meskipun telah banyak penelitian yang membahas masing-masing elemen tersebut, masih terdapat kesimpang siuran dalam literatur mengenai bagaimana integrasi dari ketiga elemen tersebut dapat secara kolektif mempengaruhi kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi dampak program BTPN Syariah, khususnya di wilayah Kota Pematang Siantar, sebagai contoh praktik

terbaik dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan mengkaji secara empiris pengaruh program pendampingan, pembiayaan, dan manajemen keuangan oleh BTPN Syariah terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik. Pertama, untuk efektivitas program pendampingan yang dilakukan oleh BTPN Syariah dalam membangun kapasitas keluarga prasejahtera di Kota Pematang Siantar. Kedua, untuk mengukur dampak pembiayaan mikro terhadap kemampuan produktif keluarga prasejahtera. Ketiga, untuk menganalisis hubungan antara manajemen keuangan yang baik dengan kualitas hidup keluarga. Keempat, untuk memahami bagaimana ketiga elemen ini bekerja secara sinergis dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi ketiga elemen dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif, yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, fokus pada program spesifik dari BTPN Syariah memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan kebijakan pemberdayaan berbasis syariah, serta menjadi model bagi lembaga keuangan lainnya dalam mengimplementasikan program serupa. Kecanggihan penelitian ini juga mencakup penggunaan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik yang memungkinkan pengujian hipotesis secara lebih terukur dan akurat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Indonesia, khususnya di Kota Pematang Siantar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil

kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah terkait pengaruh pendampingan, pembiayaan, dan manajemen keuangan terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar. Agar penelitian ini lebih focus, maka Peneliti akan merincikan penelitian ini dengan mengemukakan beberapa rumusan masalah penelitian yang dituliskan dalam rumusan masalah berikut:

1. Apakah ada pengaruh pendampingan yang diberikan oleh BTPN Syariah terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh BTPN Syariah terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar?
3. Apakah ada pengaruh manajemen keuangan yang diterapkan oleh keluarga prasejahteraa produktif terhadap kualitas hidup mereka di Kota Pematang Siantar?
4. Apakah ada pengaruh secara simultan dari pendampingan, pembiayaan modal usaha, dan manajemen keuangan terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendampingan, pembiayaan modal usaha, dan manajemen keuangan, terhadap

kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendampingan yang diberikan oleh BTPN Syariah terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh BTPN Syariah terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar.
3. Menganalisis pengaruh manajemen keuangan yang diterapkan oleh keluarga prasejahtera produktif terhadap kualitas hidup mereka di Kota Pematang Siantar.
4. Menganalisis pengaruh secara simultan dari pendampingan, pembiayaan modal usaha, manajemen keuangan, dan literasi keuangan terhadap kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif di Kota Pematang Siantar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur dalam bidang ekonomi syariah , khususnya dalam kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian terkait peran pendampingan, pembiayaan modal usaha, dan manajemen keuangan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji topik serupa dalam konteks berbeda atau mendalami variabel yang diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat dari segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan bagi pihak-pihak terkait, seperti BTPN Syariah dan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar, dalam mendukung pemberdayaan keluarga prasejahtera produktif. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk:

- Pengembangan kebijakan pembiayaan syariah yang lebih inklusif,
- Perencanaan program pelatihan pendampingan yang menekankan pada manajemen keuangan,
- Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang lebih adaptif untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera produktif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menciptakan strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

3. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada keluarga prasejahtera produktif di bawah naungan BTPN Syariah mengenai pentingnya pendampingan, pembiayaan modal usaha, dan manajemen keuangan yang baik dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu:

- Hasil penelitian ini dapat membantu keluarga prasejahtera untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.
- Penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi BTPN Syariah dalam merancang program pendampingan dan pembiayaan yang lebih efektif sesuai kebutuhan keluarga prasejahtera produktif.

- Penelitian ini dapat mendorong pelaku usaha di sektor mikro untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien guna memperbaiki kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.